



## Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno

Wahyu Trisno Aji

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi : [wahyutrisnoaji@gmail.com](mailto:wahyutrisnoaji@gmail.com)

**Abstract :** *This article aims to describe the basics of political ethics from the perspective of Franz Magnis Suseno. The method used is qualitative which aims to analyze and describe the basics of Franz Magnis Suseno's political ethical thought. As a data collection method, it uses library research documentation techniques by including 2 sub points, namely the biography of Franz Magnis Suseno and the basics of his political ethics thinking. The results of the research are that Franz Magnis Suseno's political ethical thinking certainly also has its own unique style of thinking. He is an intellectual who lives in the country of Indonesia which has many diverse cultures. The inspiration for Franz Magnis Suseno's political ethics as far as can be seen is based on 3 things in looking at politics in Indonesia, namely the basis of Catholic teachings which are his beliefs, Javanese ethics which he admires so much and Pancasila as the ideology of the Indonesian nation which he sees as the basis of life for the Indonesian nation. Franz Magnis Suseno sees these three variables in political conditions in Indonesia.*

**Keywords:** *Political Ethics, Franz Magnis Suseno, Indonesia*

**Abstrak :** Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dasar-dasar etika politik dari perspektif Franz Magnis Suseno. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar-dasar pemikiran etika politik Franz Magnis Suseno. Sebagai metode pengumpulan data, menggunakan teknik dokumentasi penelitian perpustakaan dengan memasukkan 2 sub poin, yaitu biografi Franz Magnis Suseno dan dasar-dasar pemikiran etika politiknya. Hasil penelitian adalah pemikiran etika politik Franz Magnis Suseno tentu juga memiliki gaya berpikir yang unik. Ia adalah seorang intelektual yang tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak budaya yang beragam. Inspirasi etika politik Franz Magnis Suseno sejauh yang dapat dilihat didasarkan pada 3 hal dalam melihat politik di Indonesia, yaitu dasar ajaran Katolik yang merupakan keyakinannya, etika Jawa yang sangat dikaguminya dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang dilihatnya sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia. Franz Magnis Suseno melihat ketiga variabel ini dalam kondisi politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Franz Magnis Suseno, Indonesia

### 1. LATAR BELAKANG

Berbicara politik, mengutip pandangan Peter Frankl dalam Abd Halim (2018) bahwa politik merupakan cara bagaimana mencapai kondisi tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan Thomas T. Pureklolon mengatakan politik sebagai sebuah seni dalam kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan. Tentunya konsep politik dengan definisi ini demikian tak lepas dari istilah “kekuasaan” yang dimaknai sebagai posisi seseorang mampu mempengaruhi orang lain. Kekuasaan bagi Bertrand Russell merupakan hasil pengaruh dari yang diinginkan. Russell menjelaskan bahwa dorongan seseorang berkuasa tidak mengenal batas, selalu ada keinginan berkuasa mempengaruhi seseorang mencapai hal kepentingan. Setiap orang memiliki dorongan untuk berkuasa, baik seorang penguasa yang di legitimasi hukum/ konstitusi, atau para massa memiliki dorongan berkuasa, tetapi cukup menjadi pengikut dari seorang penguasa atau pendukung.

Pada dasarnya Politik menekankan tindakan nyata diambil oleh individu atau kelompok, melibatkan pembuatan dan kepatuhan terhadap kebijakan, yang tak lain tujuan untuk memperoleh kebahagiaan antara pemerintah dan juga masyarakat, sekaligus menekankan kerjasama, konsensus, dan pengorbanan. Dalam kerja sama inilah dituntut tindakan mengepentingkan nilai moral etis. Disaat etika dihadapkan dengan politik, seorang pemimpin (apapun sejenisnya yang memiliki kuasa) bisa diberitahu untuk memiliki kemampuan untuk tidak merugikan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk politik yang dapat memperoleh sifat moral yang tinggi, karena dalam politik diperkenalkan dengan permasalahan masyarakat dengan berbagai perdebatan untuk bertujuan mencapai sesuatu hal bersama.

Jika mengikuti jejak para intelektual dalam sejarah, tokoh-tokoh pemikir di masa lalu memiliki pandangan menakutkan jika berkenaan dengan manusia dan politik. Tokoh seperti Thomas Hobbes (1588-1679) dalam konsep politik membentuk negara seperti sosok *leviathan*, yakni sosok makhluk mitologi sejenis monster ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam perjanjian lama. Dalam aspek politik, hobbes melihat dalam aspek negara sebagai *leviathan* memiliki ruang gerak kekuasaan yang begitu kuat, tidak didominasi oleh apapun dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi negara yang sangat kuat tidak bisa di ancam dan dihancurkan. Bahkan kepentingan negara *leviathan* tersebut haruslah menjadi nomor satu atas apapun, meskipun moral dan agama harus dibelakangi.

Adapun, dalam pandangan Niccolo Machiavelli (1469-1527) dengan karyanya sang pangeran "*Il principe*" menerangkan bagaimana perpolitikan dari seorang penguasa yang semestinya harus berkriteria seperti singa yang ganas/ menakutkan/ bengis/ pemberani sekaligus menjadi rubah yang cerdas. Bagi machiavelli, sebuah moral dalam kekuasaan bahkan tidak diperlukan demi sebuah kekuasaan, prinsip pandangan machiavelli adalah lebih baik sosok penguasa dan negara mengorbankan warga negara daripada negara dan kekuasaan dari penguasa terancam, meskipun ia harus berbuat keji kepada siapapun berpotensi mengancam kekuasaan.

Masalah politik dan etika memang menjadi diskursus diskusi yang panjang oleh para pemikir-pemikir besar sebelumnya juga seperti Plato dan Aristoteles mendiskusikan etika dalam politik khususnya dalam gambaran negara ideal, juga bagaimana seorang pemimpin menjalankan pemerintahannya supaya negara bisa tetap stabil dan warga negara tetap sejahtera. memperhatikan sebuah etika dalam politik menjadi satu jalan untuk menghargai kemanusiaan. Dengan ini, dibutuhkan sebuah konsep moral manusia dalam politik yang bertujuan mengarah pada tindakan mementingkan kemaslahatan banyak orang, yakni sebuah perilaku dari masyarakat maupun pemerintah disepakati untuk ditaati dalam membentuk kesepakatan secara

bersama dari sudut pandang undang-undang, hukum, etika, Pendidikan, ekonomi dan sains yang dikenal sebagai etika politik.

Etika politik merupakan praktik dalam penilaian moral tentang perilaku politik, serta menjadi satu studi penting mengenai pengaplikasinya. Dalam etika politik yang menjadi pertanyaannya mendasar ialah apakah pemerintah boleh melakukan penyimpangan dalam kekuasaannya, atautkah boleh mengambil tindakan yang salah?, konsep ini menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut dalam kajian nilai praktis yang berorientasi pada penilaian moral politik menjadi pertimbangan, bahwa setiap pemimpin tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, dan lebih mengedepankan kemaslahatan banyak orang dengan pertimbangan-pertimbangan moralis.

Etika politik menurut Franz Magnis Suseno merupakan salah satu cabang filsafat, mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban. Baginya, etika politik diartikan sebagai asas moral yang disepakati oleh masyarakat maupun pemerintah dan dijalankan dalam proses kekuasaan, kemudian pelaksanaan maupun keputusan dibuat untuk kebaikan bersama. Konsep ini merupakan bentuk pengkhususan dari kehidupan kenegaraan. Suseno berpandangan bahwa etika politik hadir dalam mempertanyakan tanggung jawab kewajiban sebagai manusia, serta sebagai warga negara yang mentaati hukum yang berlaku.

Menurut Suseno, ada dua pertanyaan penting dalam etika politik, *pertama* bagaimana seorang penguasa menjadi institusi kenegaraan supaya bisa berjalan dengan adil dan bijaksana, dan *kedua* apa seharusnya menjadi tujuan dasar dari kebijakan politik?. Dalam bukunya berjudul "*Menggereja Di Indonesia : Percikan Kekatolikan Sekarang*" menjelaskan bahwa kesadaran pentingnya berpartisipasi politik bagi siapapun untuk bisa terlibat, baik laki-laki maupun perempuan, kelas atas maupun kelas bawah. Suseno menerangkan siapapun ikut serta dalam politik, kebebasan dan kesetaraan hak yang diberikan secara sama rata menjadi satu maksim yang dipegangnya.

Suseno berpandangan bahwa etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia dan bukan hanya sebatas pikir warga negara kepada negara ditempatinya saja. Baginya, Etika politik menjadi satu tolak ukur sekaligus tujuan seseorang menjadi penguasa dalam mengatasi ketidakadilan dan menegakkan keadilan yang semestinya, sekaligus menciptakan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Tentunya dalam bentuk mempertahankan kekuasaan dan berpolitik perlu memandang nilai-nilai moral.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Dasar-Dasar Pemikiran Etika Politik Franz Magnis Suseno dengan sumber-sumber data primer dan sekunder melalui kepustakaan. Sebagai metode pengumpulan data sendiri, menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggunakan sumber-sumber yang terdapat di dalam jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tema (Abdussamad, 2021). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Franz Magnis Suseno

Nama asli Frans Magnis Suseno adalah Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis. Ia dilahirkan di Jerman pada tanggal 26 Mei 1936, tepatnya di Eckersdorf, Silesia, distrik Glatz yang kini menjadi bagian dari Polandia. Ia adalah putra dari suami istri Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Gräfin von Magnis. Franz adalah anak tertua dari enam bersaudara, termasuk satu adik laki-laki dan empat saudara perempuan lainnya. Franz Magnis Suseno dikenal sebagai seorang pendeta, filsuf, akademisi dan humanis.

Ketika Franz berusia sekitar 25 tahun pada tahun 1961, dirinya dikirim ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan filsafat dan teologi. Adapun alasannya pindah ke Indonesia bisa di sangat sederhana sekaligus mulia, ia mengatakan bahwa ilmu yang dimilikinya dapat lebih bermanfaat bagi gereja Indonesia daripada di Jerman. Tinggal di Yogyakarta mengharuskan sosok Franz Magnis untuk belajar berbahasa Jawa untuk menyesuaikan diri, tentunya kala itu Franz Magnis mengalami kesulitan mempelajari bahasa tersebut, namun dengan keseriusannya dirinya berhasil bisa belajar berbahasa Jawa meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada tahun 1977, Franz memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan awalnya dikenal sebagai Franz Graf von Magnis. Nama “Suseno” kemudian ditambahkan di akhir namanya sebagai tanda pengakuan kewarganegaraan barunya sebagai warga negara Indonesia.

Nama “suseno” merupakan bagian dari tradisi wayang Jawa dan menunjukkan kesediaannya beradaptasi dengan budaya Jawa. Perubahan ini mencerminkan integrasinya dengan warisan budaya Indonesia. Ketertarikannya terhadap tradisi Jawa tercermin pada tahun 1981, ketika ia menerbitkan buku pertamanya tentang Kebijakan dan Etika Jawa. Sejak awal berada di Indonesia, Romo Magnis sudah memperhatikan kesopanan santai dan keanggunan masyarakat Jawa. Namun, ia juga merasa penasaran dengan perilaku pendiam dan

misterius yang sering dijumpai pada masyarakat Jawa. Keinginannya untuk memahami norma-norma etika Jawa dan membandingkannya dengan tradisi Eropa menciptakan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan budaya.

Perjalanan pemikiran Franz Magnis banyak dilimpahkan ke dalam tulisannya, ia sering menulis bidang filsafat, dialog, etika serta ilmu teologi. Ia memiliki tulisan yang melampaui tema akademisi filsafatnya. Juga dalam tulisannya banyak menjangkau masalah-masalah yang mendesak, seperti krisis identitas kebangsaan, terorisme, radikalisme, fanatisme agama, pengusuran, kasus pembunuhan, dan berbagai masalah kemanusiaan lainnya. Semua kajian tersebut tidak lepas dari pendekatan etika yang menjadi konsentrasi pemikirannya selama ini.

Terdapat tiga alasan yang ditemukan mengapa etika sangat diperlukan dan bersesuaian dengan kondisi Indonesia, *pertama* kehidupan masyarakat yang pluralistik, termasuk dalam bidang moral, *kedua* masyarakat mengalami proses transformasi secara signifikan dari pelosok sampai dengan seluruh penjuru tanah air, dan *ketiga* proses perubahan sosial budaya dan moral. Bahkan, salah satu bukunya secara khusus membahas mengenai etika politik berjudul "*Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*". sekaligus pemikir hebat yang masih aktif menjadi pemateri mengenai etika politik di berbagai kampus dan beberapa kanal youtube.

Adapun beberapa karya dari Franz Magnis Suseno yang berhasil ditemukan oleh peneliti, yang diantaranya. Rasa hormat dan hak: Etika Jawa dalam tantangan orientasi, perpustakaan filsafat dan teologi (1977), Etika umum: permasalahan dasar filsafat moral (1979), Kita dan wayang (1982), Konflik dan Harmoni: Manajemen dalam Wawasan Indonesia (1985), Kekuasaan dan moral: percikan refleksi etika politik (1986), Etika politik: prinsip moral dasar kenegaraan modern (1987), Etika dasar: permasalahan dasar filsafat moral (1987), Wayang dan panggilan manusia (1991), Berfilsafat dalam konteks (1991), Filsafat budaya politik: pokok-pokok pemikiran kritis (1992), Imam Gereja Indonesia: bidang pengembangan jemaat pusat pastoral (1992), Filsafat sebagai ilmu kritis (1992), Etika bisnis: dasar-dasar dan penerapannya (1994), Mencari Tokoh Demokrasi (1995), Etika Jawa: analisis filosofis kebijakan kehidupan orang Jawa (1996), Membangun Kualitas Bangsa: Antologi Seputar Indonesia (1997), 13 tokoh etika: dari zaman Yunani hingga abad ke-19 (1997), 13 model pendekatan etika: bunga rampai teks etika dari Plato hingga Nietzsche (1997), Iman dalam masyarakat: poin-poin teologis kontekstual (1998), 12 tokoh etika (2000), Mencari Makna Rasionalitas (2004), Penalaran Tuhan (2006), Memperjuangkan jiwa bangsa, dialog, perdamaian dan persaudaraan (2006), Etika nasional dan etika kemanusiaan (2008).

## Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno

### a. Agama Katolik Sebagai Dasar Etika Politik

Konsep politik yang digagas oleh Franz Magnis Suseno juga tidak lepas dari ajaran agama Katolik yang dianutnya, didalamnya menerangkan tujuan utama setiap manusia dalam hal apapun adalah untuk kemaslahatan umum, yang artinya setiap manusia bertindak untuk kemajuan dan keadaan yang lebih baik lagi. Bertanggung Jawab atas apa yang telah dilakukan dan selalu berlaku adil atas apapun.

Sejak zaman Romo Van Lith, pandangan politik masyarakat agama katolik mulai bangkit, mereka mulai terdoktrin secara evolusi terlibat sepenuhnya dalam perjuangan keselamatan, martabat dan masa depan bangsa Indonesia. Tentunya, ajarannya menekankan bukan hanya seorang laki-laki saja yang ikut berpolitik, melainkan seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam ajaran katolik boleh terjun dalam politik selagi ia membawa keberkahan bagi umat. Adapun dalam pandangan Michael & Yans Sulo (2023) dalam buku "*imam katolik di ranah publik*" bahwasanya cinta kasih kristiani di tunjukkan kepada semua umat katolik, tanpa harus membedakan suku, bangsa, keadaan sosial dan agama.

Berpolitik adalah berarti bertindak dalam ranah politik atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, orang-orang yang memiliki keyakinan agama atau berpakaian khusus seringkali juga disebut sebagai "aktor politik." Namun, tujuan mereka bukan semata-mata untuk mencari kekuasaan atau jabatan, melainkan untuk bersama-sama dengan individu yang memiliki niat baik berjuang demi menghormati hak-hak dasar manusia. Keterlibatan agama dalam politik seperti ini tidak dimaknai sebagai tindakan politik yang hanya bersifat praktis. Melalui pendidikan, para individu beragama membimbing generasi muda agar dapat memahami dunia dengan lebih baik. Melalui upaya-upaya sosial seperti memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan integrasi penciptaan, serta melalui dialog antar agama, orang-orang beragama mencari solusi untuk mengatasi tantangan perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, orang-orang beragama dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Yesus, yang menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya, termasuk saat harus menjalani jalan salib. Keteladanan Yesus ini menjadi bukti konkret kehadiran Allah dalam memberikan contoh bahwa mencapai keadilan dan kebenaran bukanlah hal yang mudah.

Dalam hal ini diperoleh satu konklusi penting dari pentingnya agama katolik bagi suseno dalam menggagas etika politiknya. Dalam bukunya "*kuasa dan moral*" menerangkan bahwa peran agama dalam sistem kehidupan sosial politik sangat diperlukan, bahkan menurutnya agama merupakan sebuah ajaran yang mendorong sebuah perubahan sosial. Franz magnis

suseno menerangkan bahwa pandangan mengenai perubahan sosial bisa dilihat dari dua kacamata, *pertama* perubahan sosial tidak serta merta diartikan sebagai kemerosotan moral, bisa saja berkenaan dengan harkat martabat manusia seperti halnya mengenai perkara hukuman mati. *Kedua* dilihat dari kemerosotan moral, oleh karena itu kemerosotan moral dijadikan sebagai akibat dan bukan sebab-sebab dari perubahan sosial.

Dalam buku yang sama, ia menerangkan faktor-faktor utama dari perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat, diantaranya penambahan jumlah penduduk, pengaruh perkembangan teknologi, kekuatan ekonomi internasional, lalu lintas komunikasi tingkat internasional, pendidikan dan lain sebagainya. Disini suseno menjelaskan bahwa eksistensi agama bukan kembali pada keadaan yang tradisional, agama baginya menjadi sebuah sarana untuk melihat semakin lebih maju sebuah peradaban dengan ajaran-ajaran yang mempelopori secara terbuka terhadap setiap perubahan yang terjadi. Bagi seseorang beragama, tentu mereka akan memahami nilai yang diajarkan di dalamnya tentang kepedulian pada dunia yang mereka tinggali, dengan demikian iman mereka semakin meningkat karena mereka memahami dan berpartisipasi dalam dunia dan sekaligus menjadi bekal tiket menuju akhirat.

Bagi suseno, agama mempertajam kesadaran, sebab semua manusia tanpa pengecualian diciptakan dengan derajat yang sama di muka bumi oleh tuhan. Segala bentuk apapun itu, seperti kekuasaan tidak akan lepas dari hukum tuhan dan moral. Bahwa setiap orang memiliki nilai nya sendiri, maka mereka berhak mendapatkan keadilannya. Agama katolik khususnya dapat memberikan semangat untuk menghadapi para penguasa yang zalim karena orang-orang yang beragama dalam membela kebenaran tidak pernah takut tuk mati.

Menurut suseno, etika politik katolik berselaras dengan lima dasar pancasila, yakni *pertama* ketuhanan yang maha esa, *kedua* kemanusiaan yang adil dan beradab, *ketiga* persatuan indonesia, *keempat* kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan *kelima* keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Bagi suseno, pancasila memuat keseluruhan tujuan bangsa indonesia sebagai negara majemuk yang memposisikan kesamaan, persatuan, kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sebagai hal paling utama.

Menurut Julius Kardinal Darmaatmadja (2022) bahwa umat katolik mengamalkan pancasila dalam membangun negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Terkhususnya dalam sila ke-2 "*kemanusia yang adil dan beradab*" salah satu cara bangsa indonesia memuliakan antar manusia. Tentunya pancasila memiliki nilai-nilai makna mendalam, sehingga sepatutnya dilaksanakan dengan tekun dengan upaya mencapai tujuan kesejahteraan yang adil dan merata

sesuai yang diamanatkan dalam sila ke-5 pancasila “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia*”.

Etika politik katolik menurut suseno bersifat etika politik universal, ia menjelaskan bahwa dalam ajaran katolik ajaran-ajaran termuat didalamnya menjelaskan secara umum dan tentunya tidak kaku. Bagi suseno, ajaran dalam katolik bersifat dinamis dimana ia memberikan catatan bahwa dalam pancasila memuat keuniversalan ajaran-ajaran etika politik katolik, hal demikian bisa dilihat dari pancasila sila pertama kebebasan beragama atau pluralisme, sila kedua disandingkan dengan kemanusiaan, HAM, dan penolakan pada kekerasan, sila ketiga disandingkan dengan nasionalisme, sila keempat disandingkan dengan demokrasi, dan sila kelima disandingkan dengan kesejahteraan.

### **Etika Jawa Sebagai Dasar Etika Politik**

Franz magnis suseno merupakan sosok pemikir besar yang hidup di indonesia yang masih hidup hingga kini. Meskipun ia lahir di jerman, namun kecintaannya pada indonesia bisa dibilang sangat mendalam, terutama ia menaruh perhatian lebih pada etika jawa. Dalam etika jawa, terdapat dua prinsip utama didalamnya, yakni prinsip rukun dan prinsip hormat. Dengan dua prinsip inilah yang melatarbelakangi etika jawa terbangun,

- a) Prinsip rukun : dimana setiap orang memegang prinsip yang sama dengan menjaga keharmonisan satu sama lain, hidup secara berdampingan serta saling peduli dan menjaga satu sama lain. Ketika hidup rukun diterapkan, maka kedamaian antar individu, maupun antar masyarakat terwujud. Hubungan yang mengikat dengan berbagai aturan memang menjadi hal yang diperlukan, ini mendorong hidup yang semestinya dimana aturan-aturan dibuat untuk tujuan harmonis. Dalam arti singkat, rukun menjadi satu tombak dalam menyingkirkan perselisihan keresahan.
- b) Prinsip hormat : seseorang yang memberlakukan perilaku hormat satu sama lain selayaknya dirinya nanti diperlakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukannya. Hormat dengan tegas memberikan kesetaraan pada siapapun itu, apapun derajat maupun kedudukannya. Setiap orang berhak untuk dihormati dan hidup untuk saling menghormati tujuan kehidupan harmonis.

Dari prinsip rukun dan hormat yang menjadi budaya etika jawa inilah yang membuat franz magnis suseno jatuh cinta dengan etika jawa. Ia menjelaskan mengenai bagaimana prinsip

rukun sebagai kondisi yang selaras, tenang serta tentram, sekaligus ia tanpa perselisihan. Adapun beberapa hal prinsip kerukunan dari pandangan suseno diantaranya;

- a) Berhati-hati, dalam bahasa jawa disebut *tepo seliro* yakni sebuah perilaku bersikap antisipasi dan menghindari atau mengukur diri sendiri. Dalam etika jawa, *tepo seliro* memiliki arti dari tindakan yang dilakukan dengan tidak terburu-buru dan melihat kondisi sekelilingnya
- b) Gotong-royong, konsep kerukunan satu ini menjadi satu hal yang paling disukai oleh Franz Magnis Suseno. Sebab, konsep ini memperlihatkan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang saling peduli dalam hal apapun, membantu dalam segi apapun. Demikian dilihat dari tindakan gotong-royong membangun masjid, sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Praktek gotong royong mewujudkan kerukunan sekaligus keharmonisan masyarakat.
- c) Selamatan : merupakan acara yang bersifat ritual dengan maksud tertentu dilakukan dengan mengundang masyarakat sekitar untuk berdoa. Aktivitas ini merupakan wujud syukur sekaligus timbul rasa kebersamaan baik secara lahir maupun batin.
- d) Musyawarah : sebuah aktivitas yang dilakukan dengan mengedepankan dialog dan mencapai keputusan dengan mufakat bersama-sama. Orang jawa selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sebab dari awal mereka memahami, pentingnya dialog dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah cara yang paling efektif.

Adapun dalam salah satu karya nya berjudul "*etika jawa : sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup jawa*" menerangkan banyak alasan kekagumannya pada budaya jawa, terkhusus dalam etika. Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bagaimana etika jawa.

*"Etika jawa memperlihatkan diri sebagai etika pengertian, dalam hubungan ini timbul pertanyaan mengenai kedudukan keutamaan-keutamaan moral dalam etika ini. dengan keutamaan moral saya maksud disini sikap-sikap kehendak yang tetap untuk bertindak secara moral, artinya menurut norma-norma dasar"*

Franz Magnis Suseno menjelaskan dalam etika jawa bahwa manusia pada suatu jalan menjamin keselamatan dan ketentraman hati, jadi suatu keadaan bermakna pada diri dan selebihnya tidak ada yang dirindukan. Dalam etika jawa yang sama miripnya dengan etika aristoteles menerangkan mengenai kelakuan kebersamaan dan kelakuan moral tidak dibenarkan dari luar, melainkan membawanya ke dalam pengalaman tersendiri. berpolitik

menunjukkan setiap individu untuk bergerak maju untuk orang lain. dengan aktif dalam berbagai hal, maka individu sudah menekankan keselamatan dan ketentraman pada diri, bahkan implikasi positif pun orang lain bisa merasakannya.

Etika Jawa memiliki dua keutamaan, diantaranya *pertama* untuk membatasi diri dan *kedua* kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan setia. Dari dua keutamaan ini, terdapat ciri-ciri teoritik yakni.

- a. Keutamaan itu bersifat formal dan negatif, artinya tidak memberlakukan tindakan sikap mana yang dituntut, melainkan sikap mana yang harus di cegah, dan
- b. Sedia dalam membatasi sekaligus menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Dalam ciri ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan keegoisan dalam sebuah pengambilan keputusan, dikedepankan bagaimana keputusan itu menguntungkan banyak orang sekaligus itu yang diharapkan oleh masyarakat.

Tuntutan utama dalam etika Jawa tak lain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu sendiri. Etika ini tidak sekedar melihat perbuatan dari sudut baik-buruk, melainkan antara orang yang bijaksana dan bodoh. Tentunya taat pada etika Jawa adalah bentuk bagaimana seseorang menerapkan sikap bijaksana kepada dirinya maupun kepada orang lain, sebaliknya melanggar etika Jawa sama halnya dengan bersikap bodoh yang notabeneanya merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menerapkan hidup dengan peraturan etika Jawa sama halnya hidup dengan menghayati *rasa* dari hidup. *Rasa* disini diartikan sebagai dimensi kehidupan yang sebenarnya dengan menjalankan prinsip-prinsip moral yang seharusnya dilakukan. Dengan *rasa*, seorang individu tersadar menjalani hidupnya. Lebih dalam lagi, seseorang yang mendalami mengenai *rasa* dalam dirinya akan menyadari bahwa hawa nafsu dan pamrih tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi sebuah gangguan dan keresahan setiap individu, dengan ini setiap individu tersebut akan tenggelam pada hakikat hidup yang sebenarnya. Ini membawa manusia kepada hidup sebenarnya secara intensif, serta bertemu dengan realitas yang ilahi.

Dalam sebuah pandangan yang mendalam, etika Jawa mampu menyelami esensi hidup hingga mencapai ketentraman hati dan keselamatan diri yang paling mendalam. Menariknya, terdapat kesamaan yang mencolok dengan etika yang diperkenalkan oleh filsuf besar Aristoteles, yang dikenal dengan sebutan etika eudaimonia. Etika ini memandang bahwa mencapai tujuan hidup yang paling baik dan tinggi dilakukan melalui pencarian yang berakar pada diri sendiri. Persamaan yang paling mencolok antara etika Jawa dan etika eudaimonia adalah bahwa keduanya bukanlah sekadar alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebaliknya, keduanya menggarisbawahi bahwa makna sejati terdapat pada perjalanan itu sendiri, dalam proses pencarian dan pemahaman akan diri dan dunia. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa tujuan tertinggi dalam hidup bukanlah suatu titik akhir, melainkan merupakan perjalanan batin yang mendalam, di mana individu menemukan kedamaian dan kesempurnaan dalam eksplorasi dan pemahaman diri mereka. Etika Jawa dan etika eudaimonia mengajarkan bahwa makna sejati dari hidup ada pada perjalanan itu sendiri (*an sich*), bukan pada tujuan akhir yang dapat diukur atau dicapai.

Mengenai kekuasaan, pandangan etika Jawa tidak sebatas pada diksi “*power*” pada umumnya. Kekuasaan dalam definisi Suseno ditulis dalam buku etika Jawa adalah manifestasi dari energi ilahi yang tak berbentuk, namun selalu kreatif, mengalir, dan meresapi seluruh kosmos. Tidak terbatas pada ranah sosial yang dipandang secara umumnya, melainkan ia menjadi satu dobrakan dari kekuatan kosmik mengalir meliputi alam semesta. Kekuatan adiduniawi, atau kekuatan dunia, ada di mana-mana, namun lebih kuat di tempat, benda, atau manusia yang memiliki pemusatan yang lebih tinggi. Kekuatan ini tak dapat dikalahkan dan kebal, memiliki sifat yang luar biasa, yang disebut sebagai “sakti.” Dan kekuatan yang memungkinkan sakti ini disebut “kasekten.”

Perlu dicatat kembali bahwa konsep ini tidak bersifat abstrak. Konsep ini merupakan bentuk banyaknya definisi mengenai kekuasaan politik digagas oleh tokoh-tokoh dunia. Pada hakikatnya, kekuasaan mempunyai substansi sendiri, sebuah eksistensi yang mandiri, tak tergantung pada hal-hal empiris. Dalam realitasnya, kekuasaan adalah hakikat paling dasar yang bisa dilihat dari segi energi-energi yang mengalir darinya. Dalam budaya Jawa, pusat kosmos yang ditunjuk adalah seorang raja yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain dengan kekuasaan yang dimilikinya. Seorang raja terbaik adalah mereka yang peduli pada masyarakatnya, membuat sebuah kebijakan dengan rujukan adil dan bijaksana. Seorang pengusaha dikatakan sukses dilihat dari rasa kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan seseorang.

### **Pancasila Sebagai Dasar Etika Politik**

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah pilar kokoh dari masyarakat Indonesia yang diwariskan dari nenek moyang kepada generasi berikutnya, yang telah terpengaruh oleh budaya Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah prinsip negara, melainkan juga sebuah pemikiran bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata “Panca,” yang berarti lima, dan “Sila,” yang berarti dasar atau fondasi, yang mengandung panduan serta prinsip-prinsip perilaku yang mendasar dan benar.

Dengan kata lain, Pancasila adalah lima prinsip dasar yang mengatur tata nilai dan perilaku yang fundamental dan benar. Ada beberapa hal menjadi alasan mengapa pancasila sangat penting dan sangat berarti bagi bangsa indonesia, diantaranya;

- a) Pancasila sebagai identitas bangsa indonesia, artinya bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama, suku dan bangsa dari sabang sampai merauke. Sehingga, dengan keberagaman ini pancasila hadir sebagai sebuah identitas bangsa yang menyatukan indonesia, seperti halnya dalam sila ke tiga, persatuan indonesia.
- b) Pancasila sebagai kepribadian bangsa indonesia, dimana lima sila dalam pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan perbuatan.
- c) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia, artinya lima sila menjadi pedoman meyakini bahwa kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kegunaan kehidupan masyarakat tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Pancasila sebagai jiwa bangsa, artinya pancasila sebagai jiwa bangsa lahir secara bersamaan dengan lahirnya bangsa indonesia.
- e) Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh pendiri bangsa.

Pancasila pada dasarnya merupakan norma yang mengatur mengenai penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan pemerintah negara. Menurut Jimly Asshiddiqie indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang memiliki tiga prinsip yang berlaku, yakni *pertama* kebebasan atau kesamaan, *kedua* kedaulatan rakyat, dan *ketiga* pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip ini tumbuh dan berkembang di masyarakat indonesia dengan tujuan mewujudkan tujuan bangsa indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 tertuang dalam alinea keempat, yakni Demokrasi Pancasila dengan jelas adalah sistem pemerintahan yang mendasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipandu oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam proses permusyawaratan dan perwakilan. Sistem ini mencerminkan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila menjadi sebuah sistem yang pada hakikatnya memiliki nilai luhur sumber dari segala gambaran norma moral yang ada, baik itu norma hukum maupun norma kenegaraan dan lainnya. Pancasila menjadi sebuah rujukan utama bangsa indonesia dalam melihat berbagai tatanan kehidupan, sebab pancasila mengandung pedoman norma sedikit tidak dua hal penting, yakni.

- a) Norma moral yang berkenaan mengenai perilaku manusia yang bisa diukur dari sudut pandang baik dan buruknya seseorang dalam berperilaku. Dan
- b) Norma hukum yakni sebuah sistem aturan yang dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pancasila menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia, dimana Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun hak masyarakat dalam segi bidang ekonomi maupun politik. Ideologi diartikan sebagai teori yang tidak selamanya berkonsentrasi pada kebenaran, melainkan juga orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu di dalamnya. Tentu Pancasila sebagai ideologi dimaksudkan disini dalam pandangan Franz Magnis Suseno ialah sebagai sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok sosial dan kebudayaan tertentu dari bangsa Indonesia.

Etika politik bangsa Indonesia dibangun dari karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga sangat diperlukan untuk menampung perilaku politis yang tidak diatur dalam aturan secara formal. Dengan demikian, bisa diperoleh bahwa etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan nilai-nilai moral. Disinilah Pancasila menjadi suatu sistem filsafat moral yang hakikatnya merupakan sumber dari segala penjabaran norma yang diberlakukan di Indonesia hari ini.

Secara umum, Franz Magnis Suseno menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian demikian selaras dengan ajaran Katolik. Dalam hal ini dirinya mengkaitkan dengan delapan prinsip etika politik Katolik sebagai salah satu hasil dari Konsili Vatikan II, diantaranya prinsip-prinsip kebaikan hati, keberpihakan pada kehidupan, kesejahteraan umum, subsidiaritas, solidaritas, hak asasi manusia, penolakan terhadap kekerasan dan prinsip persaudaraan semesta. Dirinya menuliskan dengan tegas sebagai berikut.

*"Jelas bahwa Gereja Katolik di Indonesia sepenuhnya mendukung Pancasila. Gereja memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan manusia, namun tidak memiliki ideologi politik khusus. Setiap bangsa harus menggali dan merumuskan sendiri filsafat yang mendasarinya, berdasarkan nilai-nilai budaya dan pengalaman sejarahnya sendiri. Lima sila Pancasila ternyata sangat cocok dengan pandangan Katolik tentang masyarakat yang menghormati martabat manusia sesuai dengan kehendakan Allah. Delapan prinsip etika politik Katolik yang dirumuskan di atas semua sangat relevan dalam Pancasila."*

Adapun berikutnya, ia menuliskan bagaimana perincian, mengenai keselarasan dari delapan konsep etika politik Katolik dengan nilai-nilai yang ada dalam lima dasar Pancasila, Suseno menuliskan.

*"Sila pertama mencakup kebebasan beragama. Sila kedua mendukung hak asasi manusia, menolak kekerasan, dan mempromosikan kehidupan. Prinsip kedelapan, yaitu persaudaraan universal yang baru-baru ini mendapat perhatian publik, dapat diintegrasikan ke dalam sila kedua Pancasila karena individu yang adil dan beradab juga akan menjunjung tinggi nilai-nilai. Sila ketiga dan kelima memasukkan prinsip solidaritas. Sila keempat memuat hak asasi manusia, termasuk demokrasi. Sila kelima dengan jelas mencerminkan prinsip kebaikan hati, kesejahteraan umum, serta mendukung hak asasi mereka yang kurang beruntung dengan dukungan masyarakat."*

Pancasila merupakan usaha pemikiran dari manusia Indonesia dalam mencari kebenaran, kemudian sampai menyimpulkan mengenai kehidupan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Tentunya dalam hal ini disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sehingga dalam pengimplementasian mempunyai sifat imperatif, artinya memaksa setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Sehingga, siapapun yang melanggarnya, maka mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pancasila menurut Suseno sangat penting, Pancasila mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, atau agama, yaitu masalah jati diri bangsa. Bagaimana masyarakat dapat menemukan dan merumuskan jati diri suatu bangsa yang terdiri dari banyak komunitas dengan identitas yang beragam? Pancasila merupakan solusi brilian untuk permasalahan ini.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak mendasarkan diri pada identitas suku terbesar atau umat agama terbesar. Di sisi lain, Pancasila berakar pada nilai-nilai dan cita-cita hidup yang dianut oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam kerangka Pancasila, seluruh masyarakat di Nusantara yang mempunyai perbedaan suku, budaya, dan agama yang signifikan, dapat menemukan landasan bersama yang mereka miliki. Pancasila menghubungkan mereka melalui nilai-nilai universal dan tujuan hidup, sehingga tercipta rasa kebersamaan di antara berbagai kelompok tersebut. Dalam tulisan artikel Franz Magnis Suseno berjudul *"Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan"* Suseno menuliskan.

*"...Indonesia telah mencapai sesuatu yang berbeda dengan banyak negara lain hingga saat ini. Identitas nasional, atau lebih tepatnya identitas sebagai warga Indonesia, tidak menghancurkan dan mengancam identitas etnik, budaya, atau agama setiap komunitas, tetapi justru melindungi dan menghargai identitas tersebut. Di Indonesia, orang Indonesia merasa bangga karena mereka adalah warga Indonesia, sekaligus sebagai orang Bugis,*

*Minang, Jawa, atau Manggarai, misalnya. Orang Islam Indonesia tidak perlu mengorbankan aspek keislamannya untuk menjadi bagian dari Indonesia, dan orang Katolik dapat merasakan diri mereka sebagai "100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia," sesuai dengan pernyataan dari Mgr. Albertus Soegijapranata. Oleh karena itu, persatuan di Indonesia sangat kuat. Identitas nasional mendukung identitas unik masing-masing komunitas, dan identitas masing-masing komunitas turut menguatkan identitas Indonesia secara keseluruhan”.*

Kekaguman mengenai pancasila pun sebagai sebuah falsafah bangsa indonesia ia tuangkan dalam buku “*kekuasaan dan moral*” yang lebih menariknya bahwa pancasila menurut suseno adalah sebuah ideologi yang membuat masyarakat indonesia yang majemuk tidak dilema ideologis. Pancasila dibuat semata-mata dari para tokoh-tokoh besar yang juga memiliki pemikiran-pemikiran besar, secara bersama-sama mereka adalah merumuskan sebuah nilai yang bisa diterima oleh seluruh bangsa indonesia, saat ini dikenal dengan pancasila.

Menurut Suseno, empat prinsip etika politik modernitas yang paling mendasar meliputi kebebasan beragama, hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, yang harus ada dalam kerangka negara bangsa indonesia dibandingkan dengan sila Pancasila:

- 1) Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa jelas mendorong penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penolakan terhadap kekerasan dan pemberian jaminan hak asasi manusia.
- 3) Persatuan Indonesia menekankan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks masyarakat post tradisional. Masyarakat yang diatur secara bijaksana melalui negosiasi dan perwakilan di abad ke-21 menandakan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
- 4) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan perlunya solidaritas bangsa Indonesia yang berarti tujuan utama pembangunan adalah memberdayakan masyarakat yang masih miskin, terpinggirkan, lemah dan kurang beruntung.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran etika politik Franz Magnis Suseno tentunya juga memiliki corak pemikiran tersendiri yang khas. Dirinya adalah intelektual yang hidup di negara Indonesia notabene beraneka ragam budaya, bahasa, ras, suku, bangsa dan adat istiadat. Inspirasi etika politik Franz Magnis Suseno sejauh yang bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya ialah dilandasi oleh tiga variabel, yakni dari dasar ajaran Katolik yang menjadi sumber kepercayaan dan keyakinan, etika Jawa yang begitu ia kagumi dengan prinsip kemasyarakatan dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang dilihatnya sebagai dasar hidup sebuah bangsa Indonesia yang pas/cocok. Agama Katolik bagi Suseno memiliki tujuan utama ialah menyelamatkan warga negara, ajaran Katolik tidak berpolitik, tetapi ketika kondisi sebuah bangsa memerlukan keselamatan. Ajaran Katolik memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia, yang mengedepankan kepentingan bersama, menghormati keberagaman agama, dan mempromosikan keadilan sosial. Adapun etika Jawa yang hadir ditengah masyarakat Indonesia membentuk sebuah kondisi masyarakat yang mengutamakan prinsip toleransi dan saling menghormati.

#### DAFTAR REFERENSI

- Cakranegara, J. J. S. (2021). Pemikiran pemuka agama Katolik Indonesia tentang ideologi dan dasar negara Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2). Diakses dari <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/download/37/16>
- Budiarto, C. T., & Others. (2003). *Formasi dasar orang muda: Untuk para mahasiswa*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam: Konstruksi dan perspektif. *Menara Ilmu*, 15(1). Diakses dari <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/2389/1965>
- Darmaatmadja, J. K. (2022). *Umat Katolik memuliakan manusia: Merajut NKRI yang sejahtera iman atas kemanusiaan*. Sleman: PT Kanisius.
- Thompson, D. (2018). Political ethics. In *International Encyclopedia of Ethics* (p. 2). Diakses dari [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37093184/Political-Ethics-Revised\\_Version.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37093184/Political-Ethics-Revised_Version.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- Eko, & Others. (2016). *Etika politik: Edisi revisi*. Semarang: Widya Karya.
- Gori, N. (2018). Codes of ethics for political parties and their role in communication: In the time of electoral campaigns. *Postmodern Openings*, 9(1). Diakses dari <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=625365>

- Gunadi, I. (2017). *Konsep etika menurut Franz Magnis Suseno (Skripsi)*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Halim, A. (2018). *Politik lokal: Aktor, problem, dan konflik dalam arus demokratis*. Malang: Intrans Publishing.
- Hamid, I. (2020). *Perilaku politik: Dialektika teoritis-empiris untuk penguatan demokrasi di era post truth*. Sanabil.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hermanto, A. B. (2020). Etika berdemokrasi Pancasila dalam kontestasi politik era digitalisasi. *Selisik*, 6(2). Diakses dari <https://journal.uni pancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2212/1220>
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Ikhwan, M. A. (2016). Machiavelli: Pembeneran kekerasan dalam politik kekuasaan. *Al-Ijtima'i*, 2(1), 111. Diakses dari <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/544/344>
- Mahendra, P. R. A. (2015). Pancasila sebagai etika politik. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Acarya FKIP Universitas Dwijendra*. Diakses dari [https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2549/pdf\\_1](https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2549/pdf_1)
- Marco, G. (2017). The political ethics and the attribution of moral responsibility to public organization: Its scope and its limits. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(4), 128. Diakses dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1529-209620180000019008>
- Muhammad, N. A., & Hambali, R. Y. A. (2021). Kejujuran dan etika dalam konsep politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 59. Diakses dari <http://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/download/115/64>
- Murtianto. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai dasar terbentuknya negara. *Noval Argumentum*, 1(1), 103. Diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/noa/article/download/4466/2395>
- Muzayyanah, S. (2021). Aktualisasi nilai-nilai etika Jawa pada masyarakat transmigran: Studi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.
- Nursanik, & Mursida, I. (2020). Kritik nalar pemikiran politik Thomas Hobbes. *Al-Qisthas*, 11(2), 18-19. Diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/3794/2815>

- Oktaviani, J., & Pramadya, T. P. (2019). Model negara kekuasaan: Tinjauan pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli. *Indonesia Perspective*, 4(2), 181-182. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/26701/16088>
- Pabubung, R. M., & Sulo, R. D. Y. (2023). *Imam Katolik di ranah publik*. Sleman: PT Kanisius.
- Pananrang, A. R., & Murlinah. (2017). *Etika birokrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Pureklolon, T. T. (2018). *Komunikasi politik: Mempertahankan integrasi akademis, politikus dan negarawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku politik: Menelisik perpolitikan Indonesia sebagai medium menuju negara sejahtera*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putri, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai sistem etika. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 176. Diakses dari <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/download/1327/517>
- Rachmawati, D. W., & Others. (2022). *Pengantar ilmu politik*. Jawa Tengah: EUREKA Media Aksara.
- Russell, B. (2019). *Kekuasaan: Sebuah analisis sosial dan politik* (H. Basri, Trans.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Salazar, M. (2015). Dialog, kritik, mission Franz Magnis-Suseno, ein indonesischer Jesuit aus Deutschland. *Archipel: Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, 89, 210. Diakses dari <https://journals.openedition.org/archipel/509>
- Suryanti, L. (2014). Pancasila sebagai ideologi negara dan hak asasi manusia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, 5(1). Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/101/98>
- Suseno, F. M. (2020). *12 Tokoh etika abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F. M. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suseno, F. M. (1995). *Kuasa dan moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, F. M. (2022). Di abad ke-21: Pancasila apa masih diperlukan? *Jurnal Pancasila*, 3(2). Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/80122>
- Suseno, F. M. (2020). *Menggereja di Indonesia: Percikan kekatolikan sekarang*. Sleman: PT Kanisius.
- Suseno, F. M. (2020). Panggilan Kristiani, gereja, filsafat dan Pancasila. *Logos*, 17(2). Diakses dari <http://repo.driyarkara.ac.id/150/1/LOGOS.pdf>
- Sutono, A. (2015). *Etika Jawa sebagai 'Global Ethic' baru*.

Thompson, D. (1999). Etika politik pejabat negara (B. Molan, Trans.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Wijaya, D. N., & Others. (2018). Humanisme menurut Niccolo Machiavelli. Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 2(2). Diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jtppips/article/viewFile/2492/1503>

Yanto, D. (2017). Etika politik Pancasila. Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 15(27), 23. Diakses dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/download/1596/1164>